



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dewan Minta Eksekutif Koordinasi Dengan BPK

RBI, BENGKULU Dari Fraksi Gerindra Provinsi Bengkulu saat penyampaian pandangan fraksi atas Raperda APBD-P tahun 2018 dengan tegas meminta serta menyarankan agar pihak eksekutif dapat berkoordinasi secara intensif dengan BPK serta BPKP terkait untuk pembayaran utang.

"Dari total utang Rp 87 Miliar itu yang sudah audit oleh BPK dan BPKP hanya Rp 27,5 M. Artinya, untuk membayar sisa utang Rp 67 M, maka pihak Pemda

Provinsi Bengkulu kami imbau agar berkoordinasi dengan BPK dan BPKP," tegas Ketua Fraksi Gerindra Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP, MM saat menyampaikan pandangan fraksinya, Rabu (12/9).

Dengan adanya perubahan kebijakan dan pergeseran anggaran tahun 2018 ini, lanjutnya, pihaknya juga mengingatkan hendaknya eksekutif juga mempertimbangkan soal waktu dimana sisa masa tahun anggaran 2018 menyisakan tiga bulan

lagi. "Sebab itu, segera laksanakan program kegiatan yang telah disusun sebelumnya dan terutama yang tidak mengalami perubahan, mengingat sisa masa waktu efektif kita tinggal tiga bulan kedepan. Untuk kegiatan yang tidak ada perubahan, tidak usah ragu. Segera lakukan lelang dan kerjakan. Namun tetap sesuai dengan koridor yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, dari Sekda Provinsi Bengkulu, H. Nopian Andusti ST, MT menyikapi pandan-

gan Fraksi Gerindra itu. Dia menjelaskan, bahwa saran dan masukan yang disampaikan oleh dewan provinsi agar mereka tetap berada dalam koridor aturan hukum yang berlaku. "Itu masukan yang sangat positif bagi kami. Dan terkait pembayaran utang, itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama, utang yang sudah tercatat dan telah masuk neraca. Yang sudah masuk neraca itu Rp 27,5 M. Sedangkan yang Rp 67 M itu belum masuk

neraca. Yang sudah masuk neraca itu artinya yang sudah terbukukan, sudah diaudit oleh BPK. Dan untuk yang Rp 67 M itu, kita belum bisa memastikan masuk dalam APBD Perubahan atau APBD tahun 2019. Yang jelas saat ini kita tunggu dulu hasil audit verifikasi dari BPK. Kemudian saat akan dibayar akan dikaji ulang oleh BPKP. Dan kami terus berkoordinasi dengan pihak BPK maupun BPKP," pungkaskan Sekda. (idn)